

Rabbani. F. N, Amirulloh. M. R, Purwanti. D (2026). Analisis Kinerja Bpbd Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Cikakak Tahun 2025). *Prediksi*. Vol. 25 (2) 367-378.

Analisis Kinerja BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Cikakak Tahun 2025)

Fathira Nurul Rabbani^{1*}, M. Rijal Amirulloh², Dian Purwanti³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹fathiranurul@ummi.ac.id, ²mrijalamirulloh@ummi.ac.id, ³dianpurwanti042@ummi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

27 Mei 2026

Received in revised form:

25 Juni 2026

Accepted:

19 Juli 2026

Keyword:

Public organizational performance, BPBD, landslide disaster, disaster mitigation

Kata Kunci:

Kinerja Organisasi Publik, BPBD, bencana tanah longsor, mitigasi bencana

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sukabumi Regency in managing landslide disasters in Cikakak District in 2025. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving BPBD officials, the Cikakak District government, and affected community members. The analysis was based on Agus Dwiwanto's public organizational performance theory, which includes productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The findings indicate that the overall performance of BPBD Sukabumi Regency was satisfactory. BPBD successfully implemented disaster mitigation programs, emergency response activities, victim evacuation, and aid distribution effectively. The quality of services was considered adequate, disaster responses were carried out promptly through effective coordination, operational activities were conducted in accordance with established procedures, and accountability was maintained through transparent reporting mechanisms. However, improvements are still needed in disaster mitigation capacity, early warning systems, and community preparedness to reduce the risks and impacts of future landslide disasters in the area.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak tahun 2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak BPBD, pemerintah Kecamatan Cikakak, dan masyarakat terdampak bencana. Analisis dilakukan menggunakan teori kinerja organisasi publik Agus Dwiwanto yang meliputi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Sukabumi secara umum telah berjalan baik. BPBD mampu melaksanakan program mitigasi, penanganan bencana, evakuasi korban, serta penyaluran bantuan secara efektif. Kualitas pelayanan dinilai memadai, respons terhadap kejadian bencana berlangsung cepat melalui koordinasi yang baik, pelaksanaan tugas dilakukan sesuai prosedur, dan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan secara transparan. Meskipun demikian, BPBD masih perlu meningkatkan kapasitas mitigasi, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat guna mengurangi risiko dan dampak bencana tanah longsor di masa mendatang.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: fathiranurul@ummi.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam karena faktor-faktor geografis, geologis, serta iklim tropis yang menyebabkan curah hujan cukup tinggi. Salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah tanah longsor, yang biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi, kondisi lereng yang curam, serta faktor non-alam seperti perubahan fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor masih sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan tanah longsor termasuk dalam bencana yang menyebabkan dampak korban jiwa yang cukup tinggi. Potensi tinggi terjadinya bencana tanah longsor di Indonesia tidak terlepas dari kondisi topografi wilayah yang didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan. Hal ini juga berlaku di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tanah longsor tertinggi. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten yang berada di bagian barat daya Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Palabuhan ratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dan juga di Pulau Jawa. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor di sebelah utara, Kabupaten Cianjur di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak, Provinsi Banten di sebelah barat. Koordinat: 6.9872757°S 106.5510934°E. Dengan total luas wilayah 4.161 KM², wilayah ini memiliki ketinggian 2.112 meter. Dengan jumlah 47 Kecamatan, 381 Desa. Dari total keseluruhan 157 Desa diklaim mandiri, 169 desa maju dan 55 desa berkembang.



Gambar 1.1 peta wilayah kerja BPBD Kabupaten Sukabumi

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi yang memiliki kondisi geografis yang terdiri dari area perbukitan dengan kemiringan lereng yang cukup curam dan curah hujan yang tinggi sehingga memiliki potensi besar terjadi bencana tanah longsor. Selain itu, tingkat kejadian bencana tanah longsor yang tinggi di Kabupaten Sukabumi yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, lingkungan, serta masyarakat yang terkena dampaknya menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk daerah yang rawan terhadap bencana tersebut.

Tabel 1.1 Data Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun, 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH BENCANA
1	Bantar Gadung	7
2	Bojong Genteng	4
3	Cibadak	12
4	Cikidang	16

5	Cicurug	30
6	Cicantayan	1
7	Ciwalat	0
8	Caringin	13
9	Cisaat	5
10	Cisolok	18
11	Cikembar	5
12	Cidahu	4
13	Ciemas	4
14	Ciambar	8
15	Cirenghas	7
16	Cidolog	3
17	Curug Kembar	7
18	Cikakak	37
19	Cidadap	2
20	Cimanggu	0
21	Parungkuda	7
22	Parakansalak	18
23	Pelabuhan Ratu	4
24	Pabuaran	5
25	Purabaya	9
26	Nyalindung	6
27	Nagrak	26
28	Simpenan	15
29	Sukabumi	6
30	Sukalarang	7
31	Sukaraja	6
32	Surade	1
33	Sagaranten	1
34	Kabandungan	15
35	Kalapanunggal	2
36	Kalibunder	1
37	Kadudampit	12
38	Kebonpedes	1
39	Lengkong	5
40	Warungkiara	8

41	Waluran	6
42	Gegerbitung	7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa beberapa kecamatan, khususnya Cikakak memiliki tingkat bencana tanah longsor yang cukup tinggi. Tingginya tingkat bencana tanah longsor berdampak pada kerusakan rumah, akses jalan, dan terhambatnya aktivitas warga. Kondisi ini menegaskan bahwa kerentanan terhadap bencana tanah longsor masih sangat tinggi di Kabupaten Sukabumi.



Gambar 1.2 Berita bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak
Sumber: Sukabumiupdate.com

Pada gambar 1.2 menunjukkan bencana tanah longsor yang menimpa jalan desa di Kampung Salak Data, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan rumah dan memutuskan jalur penghubung antar kampung.

Gambar 1.3 Kegiatan Verifikasi National Tsunami Ready Board



Sumber: Pengabdian.dpmk.itb.ac.id

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC-UNESCO). Dua desa di Kabupaten Sukabumi yakni desa Cikakak, Kecamatan Cikakak dan Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu mulai memasuki tahun

verifikasi lapangan tingkat nasional untuk di akui sebagai desa komunitas masyarakat siaga Tsunami Ready Community. Program tersebut dapat dijadikan bukti empiris bahwa BPBD Kabupaten Sukabumi telah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Keterlibatan BPBD dalam proses verifikasi Tsunami Ready Community menunjukkan bahwa instansi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan bencana saat terjadi, tetapi juga melaksanakan fungsi mitigasi dan kesiapsiagaan begabai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana.

Upaya dalam menanggulangi bencana tanah longsor yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan dengan terencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa BPBD memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan bencana dari fase prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Salah satu aspek penting dalam regulasi itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa upaya tanggap darurat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan efektif. Dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program pasti terdapat adanya tantangan, hambatan, dan kendala dalam mencapai hal tersebut.

Namun pada penelitian (Baedho, 2025) yang berjudul Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi. Menunjukkan bahwa kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi terhadap potensi bencana tanah longsor masih belum optimal. Kondisi ini mengidentifikasi adanya potensi masalah dalam proses penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat bergantung pada efektivitas kinerja BPBD, terutama saat terjadi bencana. Keterlambatan atau ketidak tepatan respons dapat meningkatkan risiko korban jiwa maupun kerugian materi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sumadinata (2005) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Moloeng (2007: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dirancang secara khusus untuk memahami fenomena atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini menggunakan deskripsi dengan kata-kata dan bahasa alami, bukan berupa angka atau statistik, sekaligus mempertimbangkan konteks spesifik di mana pengalaman tersebut terjadi. Selain itu, penelitian kualitatif juga melibatkan penggunaan berbagai metode ilmiah yang fleksibel, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, atau analisis dokumen, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan autentik tentang hal-hal yang sedang dikaji. Sugiono (2012: 9) mengemukakan pendapatnya tentang metode kualitatif, yang pada dasarnya adalah jenis penelitian yang bertumpu pada filsafat postpositivisme. Hal ini berarti metode ini cocok digunakan untuk menggali kondisi-kondisi objek yang ada di dunia nyata atau alamiah, di mana peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data sering melibatkan kombinasi berbagai sumber atau metode untuk memastikan keakuratan, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya fokusnya pada pemahaman mendalam melalui kata-kata

dan pola, bukan angka-angka. Akhirnya, hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna atau esensi dari apa yang dipelajari, daripada mencoba membuat generalisasi yang berlaku universal untuk semua situasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami realitas sosial yang bersifat kompleks, dinamis, dan terbentuk melalui interaksi serta pengalaman subjektif individu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks yang alami, dengan menempatkan makna dan interpretasi sebagai fokus utama dalam penelitian. Metode ini memberikan gambaran yang autentik dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, peran peneliti sebagai instrumen utama serta analisis data yang menekankan pemahaman makna menjadikan metode kualitatif relevan untuk mengungkap esensi suatu peristiwa atau pengalaman, tanpa terikat pada generalisasi universal. Oleh karena itu, pemilihan metode kualitatif menjadi landasan metodologis yang kuat untuk mencapai tujuan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti.

Dalam teknik pengambilan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, (Sugiyono, 2018 hlm. 95-96) mengatakan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam proses penentuan sampel seperti dijelaskan di atas, berapa besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Seperti telah dikutip di atas, dalam sampel *purposive* besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Adapun secara rinci yang menjadi informan dalam penelitian berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Informan 1	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi	Sebagai kepala bagian pelaksana penanggulangan bencana
2.	Informan 2	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sebagai bidang yang menangani kedaruratan dan logistik
3.	Informan 3	Kepala Kecamatan	Mitra koordinasi BPBD di tingkat kecamatan dan mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya.
4.	Informan 4	Perwakilan Masyarakat	Penerima layanan penanggulangan bencana dari BPBD

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana tanah longsor di kabupaten Sukabumi studi kasus Kecamatan Cikakak 2025 berdasarkan teori Agus Dwiyanto (2008) yang terdiri dari lima indikator yaitu Productivity, Service quality, Responsiveness, Responsibility, Accountability. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak BPBD Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikakak, Masyarakat yang terkena bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak.

Productivity (produktivitas)

Produktivitas adalah kemampuan organisasi dalam menghasilkan keluaran (output) dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil yang dicapai serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut informan ke-1 yaitu bapak Dedih Hidayat, ST. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

"Kami mengukur keberhasilan program dari sejauh mana target yang sudah ditetapkan dapat tercapai, misalnya dalam penanganan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga melihat apakah risiko dan dampak bencana berkurang serta apakah masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana".

Berdasarkan hasil wawancara di atas baik pihak BPBD Kabupaten Sukabumi maupun kecamatan dan masyarakat, dapat di simpulkan bahwa produktivitas BPBD Kabupaten Sukabumi dinilai telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dalam menangani bencana, pelaksanaan proses evakuasi, serta pemberian bantuan kepada para korban, serta manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga dan pemerintah kecamatan dalam menghadapi situasi bencana. Maka indikator penelitian Productivity (produktivitas) sudah baik.

Service quality (Kualitas Layanan)

Kualitas pelayanan merupakan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Indikator ini berfokus pada sejauh mana pelayanan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut informan ke-1 yaitu bapak Dedih Hidayat, ST. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

"BPBD menilai tingkat kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan dan masukan masyarakat, evaluasi pascalejadian bencana, serta monitoring terhadap layanan. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana."

Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat dan pihak kecamatan memberikan penilaian positif terhadap kualitas layanan BPBD. Para petugas dianggap tanggap, bersahabat, dan mampu memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, BPBD juga melaksanakan evaluasi terhadap layanannya lewat survei dan masukan

dari masyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan. Maka indikator Service quality (Kualitas Layanan) sudah baik.

Responsiveness (Responsivitas)

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, memahami permasalahan yang dihadapi, dan memberikan respons yang cepat serta tepat terhadap kebutuhan tersebut.

Menurut informan ke-1 yaitu bapak Dedih Hidayat, ST. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

"BPBD berupaya memberikan respons secepat mungkin setelah menerima laporan kejadian bencana. Salah satunya dengan adanya petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK) yang tersebar di 47 Kecamatan, sehingga untuk laporan awal BPBD menerima laporan hasil Quick Assessment dari P2BK dalam 1 x 24 Jam dan di rekap oleh pusdalops melalui website <https://sigap-bpbd.sukabumi.go.id>."

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, BPBD menunjukkan kemampuan respons yang tinggi ketika menghadapi situasi bencana. Keberadaan P2BK di setiap kecamatan berperan penting dalam memperlancar aliran informasi dan penanganan dini, sehingga baik masyarakat maupun pemerintah kecamatan merasakan kecepatan respons serta koordinasi yang tepat dari BPBD. Maka indikator Responsiveness (Responsivitas) sudah baik.

Responsibility (Responsibilitas)

Responsibilitas adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan aturan, kebijakan, prosedur, dan tugas pokok yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai apakah organisasi menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut informan ke-1 yaitu bapak Dedih Hidayat, ST. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

"Seluruh kegiatan BPBD dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, baik untuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, terutama saat terjadi bencana besar dan kompleks, penyesuaian operasional dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penanggulangan bencana yang berlaku."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur operasional standar dan aturan yang ada. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan dengan profesional, mulai dari proses evakuasi, pengumpulan data korban, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terpengaruh. Maka dari itu indikator Responsibility (Responsibilitas) sudah baik.

Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat serta pihak

yang berkepentingan. Organisasi harus bersikap terbuka dan transparan terhadap hasil kerjanya.

Menurut informan ke-1 yaitu bapak Dedih Hidayat, ST. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa:

“BPBD menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui laporan kinerja (LKJ), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), serta laporan kegiatan penanggulangan bencana kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain itu, penggunaan anggaran juga diawasi melalui mekanisme audit internal maupun eksternal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”.

Menurut hasil wawancara BPBD berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dengan efektif melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban, pengawasan alokasi anggaran, serta transparansi informasi kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat juga diberikan peluang untuk menyampaikan saran dan keluhan mengenai layanan yang disediakan. Maka dari itu indikator Accountability (Akuntabilitas) sudah baik.

Pembahasan

Analisis kinerja BPBD dalam Menangulangi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi studi kasus Kecamatan Cikakak 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak pada tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008) yang mencakup lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsif, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Produktivitas (Produktivity)

Menurut temuan penelitian, efektivitas BPBD di Kabupaten Sukabumi dalam menangani bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak dapat dianggap memuaskan. Ini dapat dilihat dari kemampuan BPBD dalam melaksanakan program penanggulangan bencana sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, termasuk penanganan insiden bencana, evakuasi para korban, dan penyediaan bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Berdasarkan pemikiran Agus Dwiyanto (2008), tingkat produktivitas tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktivitas yang dilakukan, tetapi juga oleh seberapa baik suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Temuan dari wawancara dengan pihak BPBD mengindikasikan bahwa keberhasilan program diukur berdasarkan pencapaian target dalam penanganan bencana serta usaha untuk meminimalkan risiko dan efek dari bencana tersebut. Pernyataan dari Kepala Kecamatan Cikakak juga memperkuat informasi ini, yang menyatakan bahwa BPBD sangat berperan dalam memberikan informasi terkait bencana dan penanganan di lapangan. Di samping itu, masyarakat yang terdampak juga merasakan dampak positif dari keberadaan BPBD ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, tanda-tanda produktivitas mengindikasikan bahwa BPBD telah berhasil melaksanakan tugas penanganan bencana dengan cukup efisien, sehingga membawa keuntungan bagi masyarakat.

Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi bencana longsor dianggap memuaskan. Bukti dari hal ini terlihat dari inisiatif BPBD dalam menilai kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), keluhan masyarakat, serta penilaian setelah terjadinya bencana. Berdasarkan Agus Dwiyanto (2008), mutu pelayanan berhubungan erat dengan sejauh mana organisasi mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat sebagai pengguna jasa. Melalui wawancara yang dilakukan, masyarakat mengungkapkan bahwa petugas dari BPBD bersikap ramah, cepat tanggap, dan siap memberikan bantuan saat masyarakat memerlukan. Selain itu, Kepala Kecamatan Cikakak menambahkan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dan puas dengan pelayanan yang diterima karena BPBD selalu ada dan segera menanggapi setiap insiden bencana.

Hasil penemuan ini menunjukkan bahwa layanan yang disediakan oleh BPBD telah memenuhi harapan masyarakat, sehingga mutu pelayanannya dapat dianggap baik.

Responsivitas (Responsiveness)

Kinerja BPBD Kabupaten Sukabumi dalam menangani bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Ini terlihat dari kemampuan BPBD dalam cepat merespons laporan kejadian bencana melalui kolaborasi dengan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) yang terdistribusi di seluruh kecamatan.

Agus Dwiyanto (2008) mengemukakan bahwa responsivitas adalah kapasitas organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menanggapi masalah dengan cepat dan akurat. Dari hasil wawancara, BPBD menerima laporan awal melalui P2BK dan langsung melakukan penilaian di lapangan untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Kecamatan Cikakak juga menegaskan bahwa koordinasi dengan BPBD berjalan sangat baik, bahkan informasi awal mengenai bencana sering kali berasal dari BPBD. Selain itu, warga yang terkena dampak menganggap bahwa staf BPBD datang ke lokasi dengan cukup cepat untuk melakukan penanganan. Dengan demikian, indikator ketanggapan menunjukkan bahwa BPBD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik saat bencana terjadi.

Responsibilitas (Responsibility)

Penelitian mengungkapkan bahwa BPBD Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Semua kegiatan terkait penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam aspek pencegahan, kesiapan, tanggap darurat, maupun pascabencana. Agus Dwiyanto (2008) mengemukakan bahwa tanggung jawab berhubungan dengan sejauh mana kegiatan organisasi dijalankan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Dari hasil wawancara, BPBD tetap mengikuti SOP meskipun terkadang perlu melakukan penyesuaian operasional berdasarkan situasi di lapangan. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Kecamatan Cikakak yang mengatakan bahwa pelaksanaan tugas BPBD sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Masyarakat juga berpendapat bahwa BPBD telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui kegiatan evakuasi, pencatatan korban, dan pendistribusian bantuan. Dengan demikian, indikator responsibilitas menunjukkan bahwa

BPBD telah melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountability)

Tanggung jawab BPBD Kabupaten Sukabumi dalam menangani bencana tanah longsor dapat dianggap memuaskan. Ini terlihat dari adanya sistem pelaporan dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara rutin kepada pemerintah daerah serta lembaga terkait.

Menurut Agus Dwiyanto (2008), tanggung jawab adalah kemampuan suatu organisasi untuk menjelaskan setiap aktivitas serta pemanfaatan sumber daya kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dari hasil wawancara, BPBD membuat berbagai laporan seperti Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Di samping itu, pengawasan penggunaan anggaran dilakukan melalui audit baik internal maupun eksternal.

Kepala Kecamatan Cikakak juga menyampaikan bahwa semua informasi mengenai bantuan dan penanganan bencana disampaikan dengan transparan tanpa menyembunyikan apa pun. Warga juga diberi kesempatan untuk memberikan kritik, rekomendasi, dan masukan mengenai pelayanan BPBD. Situasi ini mencerminkan bahwa BPBD telah mengimplementasikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan lima indikator kinerja yang diuraikan oleh Agus Dwiyanto (2008), kinerja BPBD Kabupaten Sukabumi dalam menangani bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak pada tahun 2025 cukup memuaskan. Namun, masih perlu ada peningkatan dalam kapasitas mitigasi bencana, kesiapan masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini, mengingat Kecamatan Cikakak merupakan daerah yang memiliki risiko longsor yang cukup tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sukabumi Studi Kasus Kecamatan Cikakak Tahun 2025, yang dianalisis melalui teori Agus Dwiyanto (2008), dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan telah berfungsi dengan baik. Dari segi produktivitas, BPBD berhasil menjalankan program dan kegiatan mitigasi bencana sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, termasuk penanganan bencana, evakuasi korban, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam hal kualitas pelayanan, warga dan pihak Kecamatan Cikakak menganggap bahwa layanan yang disediakan oleh BPBD sudah memadai, yang terbukti dengan responsivitas, keramahan, dan ketanggapan para petugas dalam membantu masyarakat saat bencana terjadi.

Dalam hal responsivitas, BPBD menunjukkan performa yang memuaskan ketika merespons laporan kejadian bencana lewat koordinasi yang terjalin bersama Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) dan pemerintah setempat, sehingga penanganan dapat terlaksana dengan segera. Dari sudut pandang responsibilitas, semua aktivitas penanggulangan bencana dilakukan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang berlaku, meskipun dalam kondisi tertentu, modifikasi mungkin diperlukan sesuai keadaan di lapangan.

Di sisi lain, terkait akuntabilitas, BPBD telah melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban atas kegiatan dan penggunaan dana dengan berbagai saluran pelaporan dan juga menerapkan transparansi informasi kepada masyarakat serta instansi terkait. Secara umum, temuan studi menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kecamatan Cikakak. Meskipun demikian, mengingat bahwa Kecamatan Cikakak adalah daerah yang cenderung rentan terhadap longsor, BPBD perlu memperkuat upaya mitigasi bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko serta dampak bencana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Waluya¹, R. K. (2021). Hubungan Pengetahuan Tentang Mitigasi Bencana Longsor Dengan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat Di RT001/RW002 Desa Cibadak Wilayah Kerja Puskesmas Sekarwangi Kabupaten Sukabumi . Jurnal Kesehatan Aeromedika.
- Baedho, S. A. (2025). KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP POTENSI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SUKABUMI .
- Dr. TEDDY CHANDRA, S. M. (2020). SERVICE QUALITY, CONSUMER SATISFACTION, DAN CONSUMER LOYALTY: TINJAUAN TEORITIS. Malang: CV IRDH .
- Emiliani Nindy Diana Rusega Sim, P. A. (2023). KINERJA PELAYANAN PUBLIK. 20-27.
- Endangsari, E. (2019). PENERAPAN BLENDED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN PPKn . perpustakaan.upi.edu.
- McBain, L. (2010). STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR . E-Leader Singapore.
- Naufal Ridho Aji¹, T. A. (2024). ANALISIS PENILAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENANGGULANGI BENCANA . Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN).
- Ningrum, E. R. (2021). ANALISIS KINERJA PEGAWAI DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA SELATAN TAHUN 2021. 4.
- Putra¹, S. A., Rusba², K., Ramdan³, M., Fuadi⁴, Y., & Ananta⁵, E. (2024). KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA BALIKPAPAN . Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan , 2656 1891 .
- Sampe³, M. M. (2021). Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara . JURNAL GOVERNANCE , 2088-2815.